

PELESETAN AKRONIM SEBAGAI STRATEGI KRITIK SOSIAL DAN RESISTENSI VERBAL

D. Jupriono

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Relasi: Jurnal Penelitian Komunikasi; jurnalrelasi@gmail.com
juprion@untag-sby.ac.id;

Achluddin Ibnu Rochim

Program Studi Administrasi Publik,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Court Review: Jurnal Penelitian Hukum; jurnalcourtreview@gmail.com
didin@untag-sby.ac.id

Lukman Hakim

Program Studi Ilmu Komunikasi,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
RADIX: Jurnal Filsafat dan Agama; jurnalradix@gmail.com
lukman@untag-sby.ac.id

ABSTRAK

Menghadapi rezim otoriter Orde Baru dan rezim liberal Reformasi, mahasiswa sebagai pihak oposan yang "kreatif" tidak kurang akal. Ia pun mendayagunakan potensi energi bahasa untuk melancarkan kritik social dan resistensi verbal. Kajian ini mengangkat strategi kritik sosial dan resistensi verbal kebahasaan mahasiswa terwujud dalam akronim-singkatan pelesetan melalui perspektif sosiolinguistik kritis. Teknik rekayasa akronim-singkatan bernuansa politis meliputi dua hal penjungkirbalikan dekonstruksi semantis, yaitu menggunakan kata-akronim-singkatan nonpolitis untuk maksud politis dan menggunakan kata-akronim-singkatan politis untuk maksud nonpolitis. Bentuk akronim-singkatan pelesetan berfungsi melakukan identifikasi kelompok, membuat representasi keadaan sosial, melancarkan kritik, peringatan, dan perlawanan, serta meledek kebijakan penguasa. Objek yang dituju bentuk pelesetan adalah para presiden, DPR, MPR, hakim, jaksa, militer, polisi, partai politik, keluarga Cendana, dan pejabat umum.

Kata-kata kunci: *akronim pelesetan, sosiolinguistik kritis, strategi kritik sosial, resistensi verbal*

ABSTRACT

Facing the authoritarian New Order regime and the liberal Reform regime, students as a "creative" opposition party are no less resourceful. He also utilizes the energy potential of language to launch social criticism and verbal resistance.

This study raises the social criticism strategy and verbal resistance of students' language manifested in acronyms-abbreviations of puns through a critical sociolinguistic perspective. Engineering techniques for acronyms-abbreviations with political nuances include two things that overturn semantic deconstruction, namely using non-political words-acronyms-abbreviations for political purposes and using political words-acronyms-abbreviations for non-political purposes. The acronym-abbreviation form of pun functions to identify groups, make representations of social conditions, launch criticism, warnings, and resistance, as well as ridicule the policies of the authorities. The objects targeted by this form of pun are presidents, DPR, MPR, judges, prosecutors, military, police, political parties, the Cendana family, and public officials.

Keywords: *acronym pun, critical sociolinguistics, social criticism strategy, verbal resistance*

A. PENDAHULUAN

Dalam kajian monumentalnya tentang resistensi terselubung orang-orang yang kalah dan terjepit nasib (kelompok subordinat) dalam *Domination and Arts of Resistance: Hidden Transcripts* (1991), J.C. Scott menampilkan rupa-rupa kreativitas gerakan perlawanan terselubung para petani penggarap dan buruh tani terhadap ketidakadilan akibat kesewenang-wenangan kebijakan petani kaya, petani pemilik tanah, atau tuan tanah, yang berkuasa (kelompok dominan). Bentuk perlawanannya bermacam-macam, misalnya perilaku fisik berupa pencurian kecil, pembakaran pinggir lahan, perusakan pematang, pembelokan jalur irigasi, dan kerja yang "ogah-ogahan", dan perilaku simbolis berupa pergunjangan, pemberian julukan (misalnya "Tuan Kikir" untuk majikan yang pelit). Dalam konteks semacam yang lain, pemberian kepanjangan KUD yang bukan Koperasi Unit Desa, melainkan "Ketua Untung Dulu", dari para petani anggota KUD untuk menyindir perilaku culas-curang pengurus KUD, misalnya, makin melengkapinya tesis Scott. Resistensi tersembunyi dipilih karena, jika terang-terangan, mereka dapat bernasib sial mengingat ketergantungan seluruh hidupnya terhadap majikan berada dalam—menurut Scott (1991)—demarkasi etika subsistensial (cf. Glenn, 2019; Haugh & Sinkeviciute, 2019). Jika melawan terbuka, mereka bisa dipecat, tidak diberi pinjaman duit, tidak diberi "bonus" kecil panen, dll.

Di negara yang sarat aroma represi birokratis-militerismenya, seperti masa Orde Baru (Orba) (1967-1998)—bahkan sisa-sisa hegemoninya masih terasa sampai Orde Reformasi sekarang—bukan buruh tani, petani kecil, dan anggota KUD saja yang tercengkeram dalam ketidakberdayaan untuk mengontrol jalannya kekuasaan (kelompok dominan militer-birokrat), melainkan juga buruh pabrik, anggota parlemen, dan juga mahasiswa (Jupriono, 2001a; Bull & Simon-Vandenberg, 2019). Seluru elemen anak negeri sebenarnya dalam situasi ketakutan, kepasrahan yang fatalistik.

Ketika di bawah cengkeraman republik bermodel otoriter-birokratis yang menampakkan proses ketat beku *overbureaucratization* yang melembagakan teror dan kekerasan (*structural violence*), sebenarnya antara masyarakat awam dan mahasiswa sama-sama memiliki kesadaran kolektif (*collective conscience*).

Meskipun demikian, di antara semua elemen, mahasiswa lebih memiliki kekuatan penalaran (*reasoning power*) dan keberanian proporsional ketimbang masyarakat awam yang lebih merupakan massa yang diam (*silent majority*). Dengan kekuatan penalaran tersebut, mahasiswa lebih berpeluang mencari, memanipulasi, bahkan menciptakan terobosan strategis kritik di bawah kekuasaan yang berkultur antikritik. Terobosan tersebut adalah resistensi bahasa berupa rekacipta akronim-singkatan pelesetan (Jupriono, 2001; Arisanti, 2018; Prasetya & Fasya, 2019). Negara berkultur antikritik seperti rezim Orde Baru memaksa dengan koersif agar pengkritik selalu memakai tata krama kritik (*fatsoen*) yang lebih menekankan bentuk ketimbang substansi.

Perlawanan bahasa sebagai resistensi diskursif tumbuh subur di bawah rezim penguasa Orba yang mengeksploitasi energi bahasa untuk konsolidasi kekuasaan. Rezim Orba banyak memproduksi dan mendistribusikan dua jenis sebutan yang satu sama lain menampakkan standar ganda (*double standard*). Sebutan stigmatis pertama secara sepihak mengambinghitamkan dan mematikan pihak lawan, atau orang-orang yang tidak disukai, misalnya *PKI* (Partai Komunis Indonesia), *GPK* (Gerakan Pengacau Keamanan), *OTB* (Organisasi Tanpa Bentuk), "anti-Pancasila", "kelompok subversif", "orang kiri", "antipembangunan", "perongrong stabilitas nasional" (Jupriono, 2001a). Sebutan kedua memberikan pembenaran (justifikasi) atas implementasi kebijakan negara, misalnya "aparatus keamanan", "aparatus negara", dan *PPRM* (Pasukan Penindak Rusuh Massa). Dalam hal ini, sekalipun tentara bertindak melanggar hak asasi manusia (HAM) orang Irian dan Aceh selama DOM, misalnya, ia tetap dibenarkan; sebutan yang diberikan bukan *GPK* atau *GPHAM* (Gerakan Pengacau Hak Asasi Manusia), melainkan tetap *PPRM* atau "aparatus keamanan". Di sini relasi bahasa dan kesewenangan kekuasaan tampak sangat nyata (Barakos, 2020).

Saat Orde Baru berkuasa, untuk mematikan orang-orang yang tidak disukai dan untuk mencitrakannya sebagai "orang salah", bentuk bahasa macam *GPK* tersebut amat "efektif". Selama ini, pihak rakyat, yang diberi julukan sepihak itu tidak berdaya melakukan protes. Terhadap orang-orang yang tertuduh itu, penguasa mengeluarkan himbuan sepihak-subjektif agar semua pihak mencurigai, mewaspada, mempersulit urusan administrasi orang-orang yang tertuduh itu walaupun belum pernah ada proses wajar pengadilan.

Menghadapi negara otoriter-militeristik yang kerap menebarkan kebijakan koersif dan represif dan di tengah ketidakberdayaan masyarakat, mahasiswa sebagai pihak oposan yang "kreatif" tidak kurang akal. Ia pun mendayagunakan potensi energi bahasa untuk melancarkan perlawanan balik. Elemen masyarakat kampus ini diam-diam melancarkan kritik dan resistensi konkret lewat demonstrasi di ruang publik, yang meramaikan "wacana permukaan", serta resistensi verbal terselubung, yakni menggunakan sebutan, anekdot, akronim, lagu, yang menye-marakkan "wacana di bawah permukaan" (di kos-kosan, forum diskusi informal kampus, kantin kampus, dll) (Jupriono, 2001).

Tulisan ini mengangkat strategi kritik sosial dan resistensi verbal kebahasaan mahasiswa yang terwujud dalam akronim-singkatan pelesetan. Adapun tepatnya, ia berada pada ranah sosiolinguistik kritis (Singh, 1996; Strandberg, 2019), yang akan mengkaji beberapa topik yang teridentifikasi

berikut ini. Bagaimana teknik rekayasa akronim-singkatan pelesetan yang dilakukan mahasiswa? Fungsi-fungsi kritik sosial apa sajakah yang diemban akronim-singkatan pelesetan politis tersebut? Pihak-pihak manakah yang menjadi objek kritik akronim-singkatan pelesetan politis itu? Ketiga masalah ini selalu bertautan dengan aspek semantis akronim-singkatan.

Temuan penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis dan kontribusi praktis. Kontribusi teoretis dari temuan penelitian ini adalah memperkaya khazanah kajian sosiolinguistik kritis, khususnya studi relasi bahasa dan kuasa antarkelompok. Kontribusi praktisnya adalah temuan ini dapat diposisikan sebagai informasi dan pertimbangan bagi para penguasa birokrat dan militer dalam pengambilan kebijakan politis dan publik.

B. SOSIOLINGUISTIK DESKRIPTIF & SOSIOLINGUISTIK KRITIS

Sejak 1970-an, berlangsung trend kajian tentang hubungan timbal balik antara masyarakat dan bahasa, dalam sebuah ranah studi bernama sosiolinguistik. Topik-topik yang menonjol dalam kajian ini adalah variasi diferensial sistem bahasa (fonologis, morfologis, leksikalis, sintaktis) pada kelompok-kelompok masyarakat (kelas sosial, etnis, jenis kelamin, geografis, kebangsaan), bilingualisme dan diglosia, serta perencanaan dan pembakuan bahasa nasional. Banyak nama yang menyemarakkan kajian sosiolinguistik yang klasik ini, misalnya Fishman (1989), Labov (1972), Hymes (2013), Trudgill (2001), dan Hudson (2010).

Sosiolinguistik yang menyibukkan diri dalam urusan variasi bentuk-bentuk bahasa suatu kelompok pemakai ini sering disebut sosiolinguistik yang berancangan (approach) deskriptif—atau cukup sosiolinguistik deskriptif—karena kerjanya lebih banyak mendeskripsikan varian-varian dari sistem bahasa. Memang, kajian bahasa dan kekuasaan politis pun digarap, tetapi selalu dalam kerangka deskripsi bentuk-bentuk varian bahasa dari aspek sistem fonologis, morfologis, dan sintaktis. Para pendukung pendekatan ini sering mengklaim diri sebagai penegak "linguistik resmi yang sebenar-benarnya" (*linguistics proper*) (Santoso, 2000).

Kekurangan sosiolinguistik deskriptif adalah kegagalannya membedah relasi bahasa dan kekuasaan serta proses dinamis yang membayangnya. Beberapa persoalan yang luput dari perhatian sosiolinguistik deskriptif, antara lain, adalah mengapa fakta-fakta variasi bahasa seperti itu, bagaimana relasi kekuasaan itu muncul dan mempengaruhi kehidupan sosial suatu kelompok, bagaimana relasi antarkelompok yang tergambar dalam bahasa itu dikonsolidasi dan dipertahankan, serta bagaimana relasi kekuasaan itu diubah untuk kepentingan kelompok dominan, bagaimana mekanisme perubahan kebahasaan yang dijalankan kelompok dominan (Strandberg, 2019; Millar, 2019), lalu juga bagaimana reaksi kelompok subordinat (lemah) mendayagunakan bahasa untuk menghadapi kelompok dominan, dan juga relasi kesejajaran atau ketimpangan apa yang terjadi antarkelompok yang tergambar lewat varian bahasanya.

Seluruh kekurangan ini dengan sigap dituntaskan oleh sosiolinguistik yang berancangan kritis—atau cukup disebut sosiolinguistik kritis. Beberapa aktor pendukung yang sekarang lagi naik daun dalam kajian kritis ini adalah Shuy

(1996), Fairclough (2013), Singh (1996), Heller, Pietikainen, Pujolar, 2017), dan Strandberg (2019). Dalam kajian kritis ini amat menonjol telaah relasi bahasa, politik, kekuasaan, dan perlawanan antarkelompok di masyarakat, misalnya tentang rekayasa eksploitasi bahasa oleh kelompok dominan yang berkuasa dan juga terobosan kreativitas resistensi dan kritik kelompok subordinat untuk mendayagunakan segala potensi verbal bahasa. Amat kentara dalam sosiolinguistik kritis berlakunya perspektif bahwa bahasa tidak pernah netral, tidak bebas nilai, tetapi sarat nuansa politis dan kekuasaan kelompok dominan serta kritik dan resistensi kelompok subordinat. Sosiolinguistik kritis tidak berhenti pada persoalan wujud variasi bahasa suatu kelompok, tetapi justru memfokuskan kajian pada perihal kondisi sosiologis terjadinya fakta variasi bahasa dan ihwal proses relasi kekuasaan itu muncul, ditopang, dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

Dalam relasi bahasa dan kuasa, pihak penguasa lazim tertuding sebagai pihak dominan. Lewat kebijakan simbolis diskursif penuh teror terselubung, sebenarnya negara sedang mengkonstruksi wacana (*discourse*) yang diharapkan mampu menebarkan hegemoni (*hegemony*) atas masyarakat yang dikuasai. Apa pun bentuknya, ini merupakan benih-benih kekerasan, yakni kekerasan simbolis (*symbolic violence*) dan kekerasan semiotik (*semiotic violence*) (Jupriono, 2001a). Kebijakan ini memicu tergelarnya perang bahasa (*symbolic battlefield*) tempat bertarungnya wacana tandingan (*counter discourse*) dan hegemoni tandingan (*counter hegemony*) dari masyarakat (misalnya mahasiswa) menghadapi wacana dan hegemoni resmi negara.

Dalam kajian kritis kebahasaan, salah satu fungsi bahasa adalah sebagai media kategorisasi dalam konstruksi realitas sosial yang penuh pertarungan simbol, makna, dan kepentingan kekuasaan antarkelompok (Graham, 2019). Setiap benda, manusia, keadaan, dan peristiwa dikategorikan dengan pemberian nama, julukan, stigma, label, identitas, dengan bahasa (Millar, 2019). Teori labelisasi (*labelling theory*) menunjukkan bahwa labelisasi atau stigmatisasi (penjulukan) amat menonjol di kalangan penguasa sebagai sarana vital untuk membungkam taklukkan pihak lain atau siapa pun yang diidentifikasi sebagai lawan politiknya sekaligus sebagai sarana konsolidasi kekuasaan (Sitianou, 2019; cf. Schmitt & Marquez-Reiter, 2019). Tentu saja stigmatisasi tersebut sepihak dan bias kekuasaan. Sebagai reaksi, stigma ini biasanya justru memancing munculnya oposisi dan resistensi.

Selama ini kajian bahasa (linguistik, sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana) lebih menerapkan ancangan deskriptif, dan jarang yang berancangan kritis, sehingga nuansa kekuasaan dan pertarungan kelas-kelas sosial yang terpantul di dalam bahasa tidak tersentuh (Singh, 1996; Heller, Pietikainen, Pujolar, 2017). Akan tetapi, semakin disadari betapa kajian berancangan kritis lebih sesuai untuk melihat relasi bahasa dan kekuasaan (Strandberg, 2019).

Kajian kritis terhadap bahasa mempunyai beberapa sifat berikut. (1) Bentuk-bentuk bahasa yang ada di masyarakat tidak secara bebas dipilih dalam komunikasi. Pilihan bahasa dibuat menurut seperangkat kendala-kendala politis, sosial, kultural, dan ideologis. (2) Kepentingan ideologis dan politis itu tersembunyi dalam pilihan istilah, kata, kalimat, bahasa yang digunakan dalam

komunikasi. (3) Kajian bahasa merupakan bagian integral dari struktur dan proses sosial, sehingga setiap kajian bentuk-bentuk bahasa senantiasa mengikutsertakan dimensi kritis, yakni politis, ideologis, kultural, kekuasaan, tentang bagaimana masyarakat dan institusi membuat istilah dan menciptakan makna melalui teks (Santoso, 2000). Setiap wacana senantiasa mewakili dan mengindikasikan ideologi, kepentingan, nafsu kuasa, dan hegemoni dari kelompok tertentu, baik yang memicu (misalnya negara) maupun yang mereaksi (misalnya mahasiswa, buruh) (Bull & Simon-Vandenberg, 2019). Satu hal yang sudah jelas adalah baik kelompok dominan maupun kelompok subordinat sama-sama mendayagunakan kekuatan energi bahasa untuk kepentingan masing-masing.

C. TEKNIK REKAYASA AKRONIM-SINGKATAN PELESETAN POLITIS

Wujud rekayasa ini adalah kreativitas mahasiswa dalam: (1) memberi makna dan acuan baru yang politis pada kata akronim-singkatan lama yang apolitis (nonpolitis) dan, sebaliknya, (2) memberi makna dan acuan baru yang apolitis (nonpolitis) pada kata-akronim-singkatan lama yang politis. Jadi, yang baru adalah makna dan acuan yang diberikan dan bukan bentuknya.

Teknik rekayasa pertama memanfaatkan kata-akronim-singkatan yang tidak bernuansa politis, sehingga ketika mendengarnya kali pertama tidak terasa kesan politisnya. Akan tetapi, setelah mengetahui kepanjangannya, lewat berbagai konteks tuturan, disadari bahwa bentuk-bentuk tersebut ternyata sangat politis. Kata-akronim-singkatan tersebut telah dipelesetkan secara politis (dipolitisasi). (Tabel 1).

Tabel 1 Akronim-Singkatan Nonpolitis Bermakna Politis

Arti Lama	Akronim/Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
Diploma Tiga Nongelar Perguruan Tinggi Swasta	D3 PTS	Datang Duduk Duit Persatuan Tinju Senayan
Kuliah Kerja Nyata	KKN	Kanan Kiri Nona Korupsi Kolusi Nepotisme Kecil-kecil Nekat Kanan Kiri Nuntun
Sumbangan Dana Social Berhadiah	SDSB	Suharto Dalang Semua Bencana SBY Dalang Semua Bencana
Wanita Tuna Susila	WTS	Wakil Rakyat Tanpa Sopan Santun
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	PPKM	Pak Presiden Kapan Mundur Pelan-Pelan Kita Miskin Pelan-Pelan Kita Mati Para Pedagang Kehilangan Mata Pencaharian

Ketika kali pertama mendengar bentuk macam *D3*, *PTS*, *KKN*, *SDSB*, *WTS*, dan *PPKM*, mungkin persepsi kebahasaan seseorang akan mengacu pada arti lama dan biasa yang selama ini dikenalnya (kolom 1 Tabel 1); tidak ada prasangka politis. Akan tetapi, dengan konteks situasi pengucapan yang bernuansa politis, muatan politis bentuk-bentuk tersebut cepat terasakan. *PPKM*, misalnya, adalah “Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat” (news.detik.com, 2021), yang ketat diberlakukan sepanjang negara kita dicengkeram pandemi Covid-19, tapi lalu dipelesetkan sebagai “Pelan-Pelan Kita Miskin” dan bahkan “Pak Presiden Kapan Mundur” (Arumi, Giyatmi, Wijayava, Indri, 2021). Contoh lainnya adalah *DJARUM*, yang bukan merek rokok, melainkan “Demi Jabatan Aku Rela Mengkhianati”; *TIMOR*, yang bukan merek proyek mobil nasional (mobnas), melainkan “Tommy Itu Memang Orang Rakus”; *teh botol*, yang bukan minuman kemasan botol, melainkan “tehnokrat bodoh tolol”; *Toshiba*, yang bukan merek barang elektronik, melainkan menunjuk pada trio Keluarga Cendana “Tommy-Shigit-Bambang”; dll.

Teknik rekayasa kedua memanfaatkan bentuk-bentuk yang selama ini berada pada ranah politik, sehingga persepsi yang muncul ketika kali pertama mendengarnya adalah serius sarat nuansa politisnya. Ternyata, bentuk-bentuk tersebut di antara mahasiswa dimuati arti yang tidak berbobot politis sama sekali. Dengan demikian, tergelarlah penjungkirbalikan arti dalam kubangan depolitisasi. Jadi, bentuk-bentuk tersebut didepolitisasi. Makna “resmi, seram, serius” politisnya didekonstruksi menjadi “biasa, konyol, sepele” (Tabel 2).

Tabel 2 Kata-Akronim-Singkatan Politis Bermakna Nonpolitis

Arti Lama	Akronim/Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
Kepala wilayah kabupaten	Bupati	Buka paha tinggi-tinggi
Golongan Karya	Golkar	Golongan keturunan Arab
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia	ICMI	Ikatan Cewek malam Minggu Ijen
Komite Nasional Pemuda Indonesia	KNPI	Kissing necking petting intercourse
Partai Keadilan Peninjauan Kembali	PK	Penjahat kelamin

Penjungkirbalikan arti dan acuan lama ke dalam arti dan acuan baru tampak dalam Tabel 2. Kata-akronim-singkatan macam *Bupati*, *Golkar*, *ICMI*, *KNPI*, *PK*, misalnya, jelas langsung menuansakan impresi semantis yang serius, formal, baku, resmi, prestisius, dan tentu saja politis. Akan tetapi, di tangan mahasiswa, dalam wacana di bawah permukaan (Jupriono, 2001), segala yang serba angker tersebut dirontokkan dalam rekayasa dekonstruksi, sehingga menjadi mentah, santai, genit, bahkan jorok. Lalu, di manakah letak aroma politisnya? Justru dalam dekonstruksi berwajah pementahan, pembelokan, penjungkirbalikan terhadap nama dan lembaga yang serba resmi inilah muatan politisnya berada. Dengan kata lain, sebenarnya, depolitisasi adalah salah satu bentuk rekayasa politisasi. Begitulah, yang disebut rekayasa politisasi mungkin berupa tindakan politis,

mungkin juga justru yang apolitis dan depolitis (cf. Kusmanto, 2019; Putri & Sabardila, 2021)

Dengan kedua teknik rekayasa tersebut tampak terang bahwa mahasiswa sedang melancarkan jurus penjungkirbalikan hierarki hegemoni kebenaran dan kekuasaan resmi negara. Berbagai nama-akronim-singkatan konyol, murahan, jorok, oleh kalangan mahasiswa didekonstruksi dengan memberinya muatan arti dan acuan baru yang angker, politis. Maka, yang namanya *WTS*, yang kental dengan nuansa "esek-esek", misalnya, bukan lagi wanita tuna susila, melainkan "Wakil Rakyat Tanpa Sopan Santun". Sebaliknya, berbagai nama (singkatan, akronim) yang diagung-agungkan oleh lembaga pemerintah atau instansi resmi dijungkirbalikkan dengan memberinya muatan arti dan acuan konyol dan murahan (Coallier, 2017; Prasetya & Fasya, 2021). Maka pula, *ICMI* bukan lagi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, melainkan sekadar "Ikatan Cewek Malam Minggu Ijen" (*ijen*, Jawa, artinya "sendirian" di malam panjang karena tidak ada cowok yang mengapelinya).

Pada konteks ini tergambar adanya tiga relasi. Pertama, relasi tidakimbang antara negara (*state*, penguasa birokrat-militer) dan masyarakat (*society*, masyarakat kampus). Ketidakimbangan relasi tersebut tergambar dalam relasi kedua, yaitu relasi bahasa dengan kekuasaan, wacana, dan hegemoni dari sebuah rezim yang represif. Lebih lanjut, relasi kedua memicu tergelarnya relasi ketiga, yakni relasi antara bahasa, wacana, dan hegemoni resmi dan bahasa perlawanan (kekuasaan tandingan), wacana tandingan, dan hegemoni tandingan dari masyarakat kampus.

D. FUNGSI KRITIK SOSIAL AKRONIM-SINGKATAN PELESETAN

Dengan mempertimbangkan maksud berbagai bentuk pelesetan tersebut dapat dideskripsikan serangkaian fungsi kritik sosialnya. Apa yang disebut maksud tampak pada arti dan acuan baru yang diberikan. Adapun fungsi yang dimaksud adalah: mengidentifikasi dan mengelompokkan pihak-pihak tertentu sebagai kawan atau lawan politik, merepresentasikan hal, keadaan, atau peristiwa sosial, melancarkan kontrol sosial, memberikan peringatan (ancaman), dan sekadar meledek penguasa dan kekuasaan.

Bentuk pelesetan yang berfungsi sebagai media untuk identifikasi dan pengelompokan, tersebut tampak dalam akronim *Golkar*, *ICMI*, *PK* (Tabel 2), dan *Toshiba*. Contoh lainnya di Tabel 3.

Tabel 3 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Identifikasi

Arti Lama	Akronim/Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
ABRI Birokrasi Golkar	ABG	Anak Baru Gede Anak Buahnya Gus Dur
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia	ABRI	Anak Buahnya Rhoma Irama
Angkatan Muda Pembaharu Indonesia	AMPI	Anak Menantu Putra Istri
Perguruan Tinggi Swasta	PTS	Persatuan Tinju Senayan

Korps Pegawai Republik Indonesia	Korpri	Koruptor Pribumi
Orde Baru	Orba	Orang-orang Bangsat

Pada Tabel 3 tampak bahwa kebanyakan arti baru yang diberikan (arti pelesetan) pada bentuk-bentuk yang sudah biasa itu hampir selalu negatif. Kelompok-kelompok ini berkonotasi buruk, setidaknya di mata publik, terutama di kalangan mahasiswa dan media massa. Pada masa rezim Orba (sebelum Mei 1998), soal *ABRI*, *AMPI*, *ICMI*, sangat penting, harum, sakral. Hal itu sebenarnya hanya terjadi pada wacana permukaan, misalnya begitu tingginya frekuensi kemunculannya di radio, TV, koran, majalah. Akan tetapi, pada wacana di bawah permukaan, yang muncul di diskusi gelap, obrolan kos-kosan mahasiswa, kelakar di kantin kampus, juga di forum-forum kelas perkuliahan—yang jelas mustahil diberitakan media massa—yang terjadi justru titik balik: dibuat bulan-bulanan dalam lelucon, dimentahkan dalam kelakar, dijungkirbalikkan lewat anekdot dan penciptaan sebutan dan penjulukan dalam kemasan akrorim dan singkatan yang dipelesetkan artinya (Jupriono, 2001).

Terjadinya transisi kekuasaan mengakibatkan birokrat, militer, dan teknokratnya berganti. Tampaknya fakta sosial politis ini tercermin juga dalam munculnya bentuk-bentuk pelesetan (termasuk akronim-singkatan). Sebelumnya, seluruh lini kehidupan didominasi oleh keluarga Cendana (*Toshiba*, *ABRI*, *Golkar*) dan sejak 1990 *ICMI* turut pula berpartisipasi dalam Republik Indonesia Orba, sejak 1999 penumpang gerbong kehidupan politik Indonesia diwarnai oleh rombongan presiden (Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono/SBY, Djoko Widodo/Jokowi). Lahirlah *ABG*, misalnya, yang "Anak Buahnya Gus Dur", dan sejak 2001 penumpangnya beralih ke rombongan Megawati Soekarnoputri, dan lalu ke SBY dan Jokowi. Sebagai catatan, perlu dikemukakan bahwa berkat kesaktiannya, sekalipun orde telah berganti, sisa-sisa kekuatan rezim Orba masih ada di kedua era sesudahnya. Jika bahasa merefleksikan dan merepresentasikan realitas (Singh, 1996), suasana perebutan kepentingan ini pun terekam di dalamnya (Barakos, 2020; Fairclough, 2013).

Tidak semuanya berarti politis meski bentuknya amat politis. *ICMI* lagi, misalnya, yang amat angker sebagai Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu dipelesetkan menjadi tidak bernuansa politis sama sekali ke dalam "Ikatan Cewek malam Minggu Ijen"—seperti disebut di muka. Di sinilah letak pementahan, pemprofanan, penjungkirbalikkan, penyepelan terhadap nama suatu lembaga besar formal yang pernah amat mendominasi birokrasi dan Senayan. Dekonstruksi demikian jelas sebetulnya kekuasaan, wacana, dan hegemoni tandingan dari mahasiswa terhadap kebesaran dan kesakralan instansi resmi yang disakralkan.

Akronim-singkatan rekacipta mahasiswa juga berfungsi merepresentasikan hal, keadaan, atau peristiwa sosial politis, di negeri tercintanya. Di sini akronim seakan menyuguhkan deskripsi realitas sosial, sehingga, meskipun tidak persis, setidaknya akronim-singkatan yang dimuati arti dan nuansa baru sanggup melukiskan keadaan dengan cukup representatif. Contohnya adalah *D3*, *KKN*

(Tabel 1), *Bupati*, *KNPI* (Tabel 2), *teh botol*, dan *sekwilda*. Contoh lainnya di Tabel 4.

Tabel 4 Akronim-Singkatan Pelesetan Berfungsi Representasi

Arti Lama	Akronim/Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
Dewan Perwakilan Rakyat	DPR	Dewan Paling Ribut
Nama presiden ke-3 Republik Indonesia	Habibie	Habis bicara biengung
International Moneter Found	IMF	Indonesia minta-minta fulus
Majelis Permusyawaratan Rakyat	MPR	Musuh Presiden RI
Normalisasi Kehidupan Kampus	NKK	Nutupi konco-kancane
Penasihat dan pembela terdakwa	Pengacara	Pengangguran banyak acara
Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	Partai kiai bingung

Arti-acuan baru (Tabel 4) menggambarkan kejelian mahasiswa dalam mendeskripsikan realitas yang disaksikannya. Hasil observasinya, memang, bisa saja penuh prasangka subjektif. Meskipun begitu, karena munculnya pada wacana di bawah permukaan, distribusi akronim-singkatan tersebut dalam tuturan tidak dapat dikontrol, dilarang, distop siapa saja, termasuk intelijen negara sekalipun. Tatkala senasib sepenanggungan di bawah telapak republik Orba bermodel otoriter-birokratis yang menampakkan proses ketat beku *overbureaucratization* dan yang melembagakan teror dan kekerasan (*structural violence*), antara masyarakat awam dan masyarakat kampus (mahasiswa) sama-sama memiliki kesadaran kolektif (*collective consciousness*). Akan tetapi, mahasiswa memang lebih berpeluang memiliki kekuatan penalaran (*reasoning power*) dan keberanian proporsional ketimbang masyarakat awam yang lebih merupakan massa yang diam (*silent majority*). Dengan kekuatan tersebut, mahasiswa dapat saja mencari, memanipulasi, bahkan memproduksi terobosan strategi melancarkan kritik di bawah kekuasaan yang berbudaya antikritik. Terobosan tersebut adalah resistensi simbolis berupa rekacipta akronim-singkatan pelesetan. Disadari banyak pihak bahwa negara yang berbudaya antikritik lazimnya memaksa dengan kursif agar pengkritik selalu memakai tata krama kritik (*fatsoen*) yang lebih menekankan pentingnya bentuk kritik ketimbang isi substansial (Shuy, 1996; Singh, 1996; Strandberg, 2019).

Dicontohkan di sini *DPR*, *D3*, *KNPI*, *PTS*. *DPR* secara formal baku adalah wakil rakyat yang dipilih dari dan oleh rakyat. Jadi, ia lembaga tidak main-main, berwibawa, yang keputusan dan kinerjanya amat menentukan nasib seluruh awak bangsa ini. Akan tetapi, kalau semula di masa Orba mereka cuma bisa *D3* ["duduk, dengkur (tidur), (lalu terima) duit"], di masa pasca-Orba mereka larut dalam "kemaruk" euforia kebebasan kelewat batas. Apalagi, yang mereka ributkan--bahkan sampai berantem segala--ternyata lebih banyak diwarnai aroma kepentingan pribadi, keluarga, dan partainya sendiri, dan bukan kepentingan

rakyat banyak. Maka, seandainya yang diperjuangkan memang kepentingan rakyat, mungkin tidak muncul *DPR* sebagai "Dewan paling Ribut" atau *PTS* yang "Persatuan Tinju Senayan" itu. *KNPI* agak sedikit beda. Selama ini organisasi formal-resmi pemuda ini (bersama *Golkar* dan *ABRI*) terkenal sebagai pendukung apa pun kebijakan politis negara Orba, akan tetapi dalam wacana di bawah permukaan di tangan mahasiswa, *KNPI* dijungkirbalikkan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia menjadi *Kissing*, *Necking*, *Petting*, *Intercouse* (berciuman, berpelukan, bercumbu, bersetubuh).

Fungsi yang diemban bentuk pelesetan adalah melancarkan kontrol sosial (menyindir, menuduh, mencela) kepada pihak-pihak tertentu yang dirasa mengakibatkan kehidupan menjadi sewenang-wenang, jahat, tidak adil, dan rusak. Di sini tampak bahwa, sebagai salah satu bahasa, akronim-singkatan pelesetan mempunyai fungsi kontrol sosial, yang menunjukkan bahwa relasi bahasa dengan konteks kehidupan sosial sekelilingnya begitu niscaya (Trudgill, 2001; Hudson, 2010; Singh, 1996). Contohnya *KKN*, *WTS* (Tabel 1) dan *Korpri* (Tabel 3), *DPR* yang "Dewan Penipu dan Rakus", *APBN* yang "Anak Pejabat Biasa Nakal", *Gus Dur* yang "Bagusnya Mundur", *Harmoko* yang "Hari-hari Omong Kosong", *JAKSA* yang "Jejali Angpao Kau Segera Aman", *KODAM* yang "Kalau ada Duit Apa pun Mudah". Contoh lainnya lagi ada di Tabel 5.

Tabel 5 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Kritik Sosial

Arti Lama	Akronim/ Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPRD	Doyan Piknik dan Rekreasi Doang
Garis-garis Besar Haluan Negara	GBHN	Gampang Bicara Hasil Nihil
International Moneter Found	IMF	Indonesia Minta-minta Fulus
Pejabat tertinggi pemutus vonis di pengadilan	HAKIM	Hubungi Aku kalau Ingin Menang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	KUHP	Kasih Uang Habis Perkara
Undang-Undang Dasar	UUD	Ujung-Ujungnya Duit

Pelesetan yang paling terasa pada Tabel 5 adalah tajamnya aroma "KKN". Lihat saja: *HAKIM*, *KUHP*, *UUD*, semuanya berurusan dengan duit haram untuk melicinkan segala urusan tercela, membebaskan terdakwa, menutupi kejahatan. Dari kacamata agenda reformasi, yang paling dilukai adalah ihwal supremasi hukum mengingat *hakim*, *jaksa*, *UUD*, *KUHP* adalah deret infrastruktur hukum yang menentukan keadilan dan ketimpangan (Shuy, 1996) di Indonesia. Muncul adagium parodi satiris di tengah masyarakat luas, juga di kalangan mahasiswa, bahwa di Republik Indonesia tercinta ini "begitu gampang mencari pengadilan, akan tetapi demikian muskil-mustahilnya menemui keadilan" (Shuy, 1996).

Wakil rakyat masih populer untuk disorot (Sudjatmiko, 2000) dalam fungsi akronim-singkatan apa pun. Bentuk pelesetan *DPR*, *DPRD*, *PTS*, *UUD*, *GBHN*, *WTS*. Ada banyak sinyalemen bahwa wakil-wakil rakyat banyak yang "Gampang Bicara, Hasilnya Nihil" (*GBHN*), sehingga dia sering membuat kebohongan kepada publik rakyat. Bahkan, di beberapa daerah tingkat I dan II *DPRD* kebanyakan "keluyuran" yang kontraproduktif dengan tugasnya sebagai wakil rakyat, sehingga kesannya *DRPD* itu hanya "Doyan Piknik dan Rekreasi Doang". Lebih parah lagi, ketika bersidang, yang ditayangkan seluruh stasiun TV, mereka lebih banyak asal bicara, arogan, terkesan tanpa sopan santun, sehingga mereka distigma sebagai *WTS*, yakni "Wakil rakyat Tanpa Sopan santun".

Selanjutnya, fungsi yang dijalankan oleh bentuk pelesetan adalah memberikan peringatan. Peringatan ini dapat berupa ajakan kepada seluruh elemen negeri siapa pun untuk mewaspadaikan ketidakberesan, ketidakadilan, dan ketimpangan sosial, dan dapat pula berupa sikap perlawanan (resistensi) verbal karena ketidakpuasan, kesewenang-wenangan, dan kebobrokan sebuah rezim penguasa (Bull & Simon-Vandenberg, 2019). Energi bahasa berpotensi diberdayakan sebagai media untuk melancarkan peringatan keras dan perlawanan transparan atau terselubung, sebagai sebuah gerakan sosial. Berbahasa, dengan demikian, adalah aksi sosial. (Tabel 6)

Tabel 6 Akronim-Singkatan yang Berfungsi Peringatan-Perlawanan

Arti Lama	Akronim/ Singkatan	Arti Baru (Pelesetan)
Badan Koordinasi Strategi Nasional	Bakorstranas	Bahaya korupsi sudah taraf nasional
Alat/tindakan pembersihan	Sikat	Siapa pun kami terjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat	PPKM	Pak Presiden Kapan Mundur Pelan-Pelan Kita Miskin Pelan-Pelan Kita Mati Para Pedagang Kehilangan Mata Pencaharian

Memang hanya tiga contoh yang dapat diajukan di sini. Akronim peringatan dicontohi oleh *Bakorstranas*, yang tak berkaitan dengan struktur hierarki kelembagaan Hankam-Sospol, yang pernah amat menakutkan sebagai penerus Kopkamtib, sedang akronim perlawanan diisi oleh contoh *Sikat* dan *PPKM*. Barangkali, ini cermin bahwa sekalipun lebih banyak muncul pada wacana di bawah permukaan, akronim-singkatan ini memang lebih banyak bersifat "membicarakan" (perihal pihak ketiga) daripada "berbicara" langsung (dengan pihak kedua). Bukan perlawanan frontal yang ditampilkan, tetapi lebih merupakan "bisik-bisik tetangga".

Dari seluruh fungsi, fungsi kritik sosial dan resistensi verbal merupakan fungsi terpenting digelarnya akronim-singkatan pelesetan oleh para mahasiswa ini. Mahasiswa sepenuhnya menyadari bahwa watak dasar setiap kekuasaan adalah kekerasan. Tindak kekerasan tersebut bahkan diperkeras oleh kolusi dan

konspirasi struktural seluruh lembaga (pers, polisi, pengadilan, legislatif, malahan juga akademisi dan profesional). Karena hakikat negara adalah kekerasan, perlawanan simbolis lewat bahasa terselubung seperti ini menjadi alternatif realistis. Sebab, jika perlawanan dilakukan dengan bersenjata, mahasiswa akan membentur tembok dan jelas konyol. Tetapi, jelas tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran kolektif orang-orang yang tertindas dapat tumbuh menjadi sebetulnya kolektivitas yang terus-menerus untuk tanpa henti melancarkan kritik dan resistensi. Dalam perspektif Gramscian, tidak selamanya kekerasan sukses menipu publik dan membunuh kesadaran, seringkali kekuasaan tak bernalar, dan takut atau antikritik (Schmitt & Marquez-Reiter, 2019).

Terakhir, fungsi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai media meledek kekuasaan. Di dalam meledek ini terdapat unsur main-main, tidak serius, sekadar membuat lelucon. Objek tampaknya bukan sembarang objek, tetapi penguasa, tetapi yang dimaksud ternyata cukup "bikin kejutan", lain sama sekali. Contohnya adalah *DKI* bukan lagi Daerah Khusus Ibukota, melainkan "Di bawah Kekuasaan Istri"; *Edi Tansil* bukan lagi tokoh pembobol uang bank Indonesia, melainkan sekadar "ejakulasi dini tanpa hasil"; *Golkar* bukan lagi partai besar pemerintah pendukung 32 tahun rezim Orba, melainkan sekadar "golongan keturunan Arab" (guyonan ini murni ciptaan Gus Dur!); *pengacara* bukan lagi mengacu pada pembela dan penasihat hukum, melainkan menunjuk pada "pengangguran yang banyak acara"; dll. Ini merupakan main-main kelompok mahasiswa yang sedang membuat bulan-bulanan orang dan instansi besar, bukan untuk mengkritiknya, tetapi sekadar membuat kelakar, meledek saja. Alatnya adalah bahasa. Pada titik ini ancangan sociolinguistik kritis, yang getol mempersoalkan relasi antarkelompok dalam perebutan kekuasaan dan kepentingan (Heller, Pietikainen, Pujolar, 2017; Strandberg, 2019) menemukan titik tepat ketajamannya.

Objek Kritik Akronim-Singkatan Pelesetan Politis

Objek yang dimaksudkan di sini adalah siapa yang dituju, diidentifikasi, direpresentasikan, dikritik, atau diperingatkan oleh akronim-singkatan pelesetan tersebut. Objek dimaksud tidak selalu tergambar langsung lewat bentuk (bunyi, tulisan), tetapi dapat diketahui dari arti/acuan barunya (yang diberikan oleh mahasiswa). Perhatikan Tabel 7, dengan catatan: seluruh akronim-singkatan pelesetan harus dibaca pada arti dan acuan baru dan bukan arti dan acuan lama yang resmi itu!

Tabel 7 Objek Kritik Akronim-Singkatan Pelesetan

Akronim / Singkatan	Sasaran
ABG, Gus Dur, KKN, Habibie, SDSB	Presiden
ABS, AMPI, APBN, Korpri, UUD, KUHP	Seluruh pejabat
DPR, DPRD, D3, PTS, MPR, UUD	DPR, DPRD, MPR
PBB	Partai Bulan Bintang
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
TIMOR, Toshiba	Keluarga Cendana

KUHP, UUD, HAKIM, JAKSA	Polisi, jaksa, hakim
Orba	Militer, birokrasi, Golkar

Tampak pada Tabel 7 bahwa objek yang tergolong tinggi frekuensinya adalah presiden, Keluarga Cendana, wakil rakyat (DPR, DPRD I, DPRD II, MPR), hakim, jaksa, semua pejabat birokrasi, militer, dan Golkar. Bentuk-bentuk tuturan kebahasaan akronim-singkatan ini lebih banyak muncul dalam wacana di bawah permukaan. Akronim-singkatan tersebut memang bernuansa amat politis. Bentuk pelesetan yang nonpolitis pun dapat dilihat sisi politisnya. Wujud perlawanan simbolis bisa saja berupa penjungkirbalikan, pementahan, pengkonyolan—semuanya dekonstruksi—terhadap sesuatu yang sudah mapan (*establish*). Objek diciptakannya pelesetan bernuansa politis tersebut menggambarkan bagaimana pentingnya relasi politis kekuasaan antara penguasa (negara) dan mahasiswa (masyarakat).

Seluruh potensi verbal dan semantis bahasa didayagunakan habis-habisan bukan skadar sebagai alat komunikasi dan mendeskripsikan kemauan, rasa, dan pikiran, tetapi lebih dari itu untuk membangun, mempertahankan kekuasaan sekaligus melumpuhkan kelompok lawan. Masing-masing memanfaatkan bahasa untuk kepentingannya. Kekuasaan negara mengeksploitasi bahasa untuk memojokkan, membungkam, dan melumpuhkan mahasiswa, sebaliknya mahasiswa pun menciptakan akronim-singkatan bernuansa baru yang memuat nilai-nilai kritik, resistensi, atau sekadar meledek penguasa (cf. Sudaryanto, 2015). Sebagian tampak jelas transparan, sebagian lagi terselubung secara simbolis. Untuk menangkap fenomena ini, peran sosiolinguistik kritis menemukan titik relevannya untuk dijadikan perspektif pengkajian.

E. KESIMPULAN

Dari analisis di muka dapat ditarik tiga simpulan penting. (1) Teknik rekayasa akronim-singkatan bernuansa politis meliputi dua hal penjungkirbalikan dekonstruksi semantis, yaitu (a) menggunakan kata-akronim-singkatan nonpolitis untuk maksud politis dan (b) menggunakan kata-akronim-singkatan politis untuk maksud nonpolitis. (2) Bentuk akronim-singkatan pelesetan berfungsi melakukan identifikasi kelompok, membuat representasi keadaan sosial, melancarkan kritikan berupa peringatan dan perlawanan, serta meledek penguasa. (3) Objek yang dituju bentuk pelesetan adalah parpresiden, DPR, MPR, hakim, jaksa, militer, polisi, partai politik, keluarga Cendana, dan pejabat umum.

Memang, kajian ini dibatasi pada bentuk-bentuk tuturan akronim-singkatan bernuansa kritik dan perlawanan dari para mahasiswa yang muncul dalam wacana di bawah permukaan (kampus, kantin, kos-kosan, forum diskusi gelap, dll.) yang dijaring dari kampus-kampus-kampus di Jawa Timur. Padahal, pada wacana di bawah permukaan masih banyak bentuk-bentuk resistensi verbal yang lain, misalnya pantun, lagu, anekdot, puisi, selebaran, pamflet, dll. Selain itu, juga ada data lain, yakni seluruh resistensi verbal yang marak dalam aksi unjuk rasa. Semua bentuk itu merupakan ladang subur penelitian bahasa (cf. Pujiyanti, Senowarsito, Ardini, 2019) sebagai media kritik terhadap birokrasi, militer, dan

wakil rakyat serta sekaligus sebagai media resistensi terselubung terhadap kekuasaan otoriter birokratis militeristik, seperti yang dapat disaksikan pada negara teater Orde Baru, bahkan sisa-sisa aromanya pun masih tercium hingga orde berikutnya, Orde Reformasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisanti, Y.L. (2018). Penggunaan akronim dan singkatan dalam media sosial Facebook di kalangan remaja SMA Plus Multazam. *Jurnal Literasi*, 2(2), 104—112. DOI: <http://dx.doi.org/10.25157/literasi.v2i2.1351>. Akses 14-11-2022.
- Arumi, S., Giyatmi, G., Wijayava, R., Indri, P. (2021). Ragam fungsi bahasa pelesetan pada singkatan PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) di era pandemi Covid-19. *Indonesian Journal of Learning Studies (IJLS)*, 1(3), 206-222. <https://dmi-journals.org/ijls/article/view/185>. Akses 14-11-2022.
- Barakos, E. (2020). *Language policy in business: Discourse, ideology and practice*, John Benjamins Publishing Company.
- Bull, P. & Simon-Vandenberg, A.M. (2019). Conflict in political discourse: conflict as congenital to political discourse. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Coallier, J. (2017). *Acronyms & abbreviation dictionary: Social media, accounting, government, business, science, organizations, medical, religion*. Lulu Press. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Fairclough, N.L. (2013). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. 2nd Edition; e-Book. London: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315834368>. Akses 14-11-2022.
- Fishman, J.A. (1989). Domains and the relationship between micro- and macro-sociolinguistics. Hal. 435--453, *Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication*. J.J. Gumperz & D.H. Hymes (eds.). Oxford: Basil Blackwell.
- Glenn, P. (2019). Conflict interaction: Insights from conversation analysis. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Graham, S.L. (2019). Interaction and conflict in digital communication. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Haugh, M. & Sinkeviciute, V. (2019). Offence and conflict talk. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Heller, M., Pietikäinen, S., Pujolar, J. (2017). *Critical sociolinguistic research methods: Studying language issues that matter*. Routledge.
- Hudson, R.A. (2010). *Sociolinguistics*. Cambridge Textbooks in Linguistics. Revised Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

- Hymes, D.H. (2013). *Foundations of sociolinguistics: An ethnographic approach*. eBook Published. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315888835>. Akses 14-11-2022.
- Jupriono, D. (2001). Retorika perlawanan terselubung dalam wacana bahasa Indonesia. *FSU in The Limelight*, 8(1) Juli: 15-22.
- Jupriono, D. (2001a). Kajian sosiolinguistik kritis akronim-singkatan pelesetan politis: Strategi metodologi interaksionisme simbolis. *Humanika*, 5(1), 23-35.
- Kusmanto, H. (2019). Tindak tutur ilokusioner ekspresif pelesetan nama kota di Jawa Tengah: Kajian pragmatik. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 127-132. doi: <https://dx.doi.org/10.26737/jp-basi.v4i2.1036>. Akses 14-11-2022.
- Labov, W. (1972). *Sociolinguistic patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Millar, S. (2019). Hate speech: Conceptualisations, interpretations and reactions. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- news.detik.com. 12 Juli (2021). Makna PPKM, kepanjangan, hingga aturannya. <https://news.detik.com/berita/d-5640047/makna-ppkm-kepanjangan-hingga-aturannya>. Akses 14-11-2022.
- Prasetya, S.D.P.S. & Fasya, M. (2021). Penggunaan akronim dalam variasi bahasa gaul sebagai wujud kreativitas remaja di dunia maya (kajian sosiolinguistik). *Jurnal Bahtera Sastra Indonesia*, 3(2), 67-90. https://ejournal.upi.edu/index.php/BS_Antologi_Ind/article/view/41065. Akses 14-11-2022.
- Pujiyanti, A., Senowarsito, Ardini, S.N. (2019). Analysis of acronym and abbreviations in IJAL Journal. *Journal of English Language Learning (JELL)*, 3(2), 9-21. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/JELL/article/view/1596>. DOI: <http://dx.doi.org/10.31949/jell.v3i2.1596>. Akses 14-11-2022.
- Putri, E.N. & Sabardila, A. (2021). Implementasi abreviasi dalam tajuk akun Youtube Najwa Shihab. *Estetik: Jurnal Bahasa Indonesia*, 4(2), 143—158. DOI: <http://dx.doi.org/10.29240/estetik.v4i2.2587>. Akses 14-11-2022.
- Santoso, A. (2000). Paradigma kritis dalam kajian kebahasaan. *Bahasa dan Seni*, 2(28), 127-146.
- Schmitt, C.J. & Marquez-Reiter, R. (2019). Leadership in conflict: disagreement and consensus negotiation in a start-up team. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Scott, J.C. (1991). *Domination and arts of resistance: Hidden transcripts*. New Haven: Yale Univ. Press.
- Shuy, R.W. (1996). *Language crimes: The use and abuse of language evidence in the court room*. Oxford: Blackwell.

- Sifianou, M. (2019). Conflict, disagreement and (im)politeness. Evans, M., Jeffries, L., O'Driscoll, J. (eds.), *The Routledge handbook of language in conflict*. Routledge.
- Singh, R. (ed.). (1996). *Towards a critical sociolinguistics*. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam; Philadelphia.
- Strandberg, J.A.E. (2019). Critical sociolinguistic research methods: Studying language issues that matter. *International Journal of the Sociology of Language* (IJSL), 260, 99–201. <https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/ijsl-2019-2055/html>. Akses 14-11-2022.
- Sudaryanto. (2015). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Trudgill, P. (2001). *Sociolinguistics: An introduction to language and society*. 4th edition. Harmondsworth, Middlesex: Penguin Books Ltd.